



STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PERTAPAN MADURETNO KECAMATAN TAMAN SIDOARJO

Dike Wijayanti ^a

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Jurusan Ilmu Ekonomi, dikeyanti.13999@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the utilization of the village chest to boost the welfare of the community and to determine the factors that caused the development and utilization of the potential of the Maduretno Village to not progress, and to determine the village fund management strategy that was able to boost the welfare of the community. In this study, the qualitative method used to analyze the phenomenon in this study is the imbalance between village funds and village development. Where the data is obtained from various sources obtained by researchers by utilizing several scientific methods, namely collecting data, then presented descriptively in the form of sentences. Where in this study it can be seen that the utilization of village funds is categorized into two, namely the use of physical village funds and the use of non-physical village funds. The factors that affect the development of the Pertapan Maduretno village are not progressing, namely: the small number of village government human resources who understand IT in managing village finances, the lack of transparency of the village government in managing village finances, and the lack of activities in terms of empowering village communities that affect village progress.

Keywords: Village Fund, Community Welfare, Development

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan dan pemanfaatan potensi Desa Pertapan maduretno tidak mengalami kemajuan, dan mengetahui strategi pengelolaan dana desa yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena dalam penelitian ini yaitu ketidakseimbangan antara dana desa dan pembangunan desa. Dimana data-datanya diperoleh dari berbagai sumber yang didapat oleh peneliti dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah yaitu mengumpulkan data, kemudian dipaparkan secara deskriptif dalam bentuk kalimat. Dimana dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pemanfaatan dana desa dikategorikan menjadi dua yaitu pemanfaatan dana desa fisik dan pemanfaatan dana desa non fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa Pertapan Maduretno tidak mengalami kemajuan yaitu: sedikitnya jumlah SDM pemerintah desa yang memahami IT dalam mengelola keuangan desa, kurang transparannya pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa, dan kurangnya kegiatan dalam hal memberdayakan masyarakat desa yang berpengaruh terhadap kemajuan desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kesatuan dalam suatu wilayah dan diatur oleh hukum. Desa juga dapat diartikan sebagai bentuk organisasi yang berwenang dalam mengatur dan mengurus segala kegiatan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam pengembangan desa. Karena pada dasarnya, berkembangnya suatu desa

menjadi peran penting dalam mendorong kesuksesan program pemerintahan nasional. Selain itu, desa juga bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut antara lain mengelola anggaran desa. Anggaran desa merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi seperti keterbatasan dalam keuangan. Keterbatasan yang dimaksud biasanya terjadi karena ketidakseimbangan antara anggaran pendapatan desa dengan pengeluaran belanja desa atau disebut sebagai APBDes.

Pemerintah daerah memiliki tiga komponen sebagai sumber pembiayaannya, yaitu: (PAD) pendapatan asli daerah yang didalamnya mencakup pendapatan hasil pemungutan pajak, retribusi, dan hasil dari perusahaan daerah (BUMD), serta usaha daerah lain-lain yang sah. Selain itu Pendapatan dari pusat yang didalamnya terdiri dari sumbangan pemerintah, sumbangan lain yang telah diatur dalam undang-undang, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen ketiga yaitu pendapatan dari pusat yang merupakan salah satu bentuk gambaran ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Dimana pendanaan dari pemerintah pusat juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan akan proyek pemerintah yang pengimplementasiannya di daerah melalui APBN yang dimasukkan dalam APBD [1].

Pendanaan sangat mendukung adanya otonomi daerah, oleh karena itu diperlukan kecukupan dana dalam penyelenggaraan otonomi itu sendiri. Otonomi daerah itu sendiri berarti suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan desa secara mandiri. Sehingga dalam operasional desa dalam mewujudkan otonomi daerah membutuhkan pembiayaan yang berhubungan langsung dengan dana desa. Hal tersebut juga telah dicantumkan dalam UU yang menyatakan bahwa pemerintah pasti memberikan dana kepada desa melalui anggaran negara dan belanja daerah yang jumlahnya lebih besar dari jumlah yang telah dianggarkan oleh desa. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap desa akan selalu mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya lebih besar dari anggaran untuk memenuhi segala bentuk pembiayaan.

Akan tetapi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sering terjadi ketidakseimbangan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor: (1) APBDes yang dimiliki desa dan sumber pendapatan desa sangat kecil. (2) rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa. (3) dana operasional untuk pelayanan sangat rendah. (4) program pembangunan desa yang masuk sangat banyak dan hanya dikelola oleh dinas. Dimana dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwasannya pendanaan suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah yang juga termasuk di dalamnya yaitu pemerintah desa mengikuti prinsip pendanaan pembangunan mengikuti fungsi pemerintahan. Hal tersebut merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab setiap masing-masing tingkatan. Sehingga dalam upaya menjaga tercapainya standar pelayanan publik maka transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat penting [2].

Selain untuk membangun desa, dana desa digunakan pula dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dimana dengan adanya pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan upaya dalam membantu masyarakatnya agar berdaya, terampil dan mampu menghasilkan sesuatu yang mampu menambah nilai ekonomi. Dengan kemandirian masyarakat di suatu desa, maka akan semakin berkurang jumlah kemiskinan dan pengangguran di suatu desa. Dapat diketahui jika kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang selalu terjadi di lingkup masyarakat. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai angka 24 juta sekian meningkat menjadi 27,50 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah tingkat kemiskinan setiap tahun di Indonesia selalu bertambah. Untuk menekan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, pemerintah hendaknya memprioritaskan pendanaan untuk realisasi program dan seluruh kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan agar dana desa

dapat bermanfaat bagi masyarakat desa dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan .

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa Pertapan Maduretno. Dimana Desa Pertapan Maduretno merupakan desa yang terletak di kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik. Jumlah penduduk di Desa Pertapan Maduretno sekitar 4.152 jiwa. Penduduk Desa Pertapan Maduretno sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan karyawan swasta. Hal tersebut didukung oleh luasnya lahan pertanian di Desa Pertapan Maduretno. Selain lahan pertanian, banyak pula industri yang berdiri di desa ini. Jika dilihat dari potensi desa yang dimiliki, Desa Pertapan memiliki banyak sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan perusahaan daerah. Akan tetapi jumlah keluarga miskin masih banyak ditemui, badan usaha milik desa yang tidak berkembang. Hal tersebut memerlukan beberapa upaya untuk menanggulangnya.

Dari uraian diatas, banyak sekali permasalahan yang muncul karena adanya ketidakseimbangan antara pembangunan dan pengelolaan potensi desa dengan pemanfaatan Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan pembangunan dan pemanfaatan potensi Desa Pertapan maduretno tidak mengalami kemajuan?
- b. Apa saja strategi pengelolaan dana desa yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat?

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan dan pemanfaatan potensi Desa Pertapan maduretno tidak mengalami kemajuan, dan mengetahui strategi pengelolaan dana desa yang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikhususkan untuk membantu desa sebagai dana pendorong dalam membiayai seluruh kegiatan desa yang meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa di berikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) oleh pemerintah pusat [3].

Dana Desa merupakan bantuan yang berupa dana yang dialokasikan secara langsung kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, serta prioritas yang diperlukan oleh masyarakat seperti prasarana dan kelembagaan desa. Dana Desa digunakan dalam pembiayaan program desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Tujuan dari dana desa itu sendiri adalah untuk mencapai suatu desa yang mandiri dan kreatif. Dengan begitu desa mampu meningkatkan perekonomian desa, mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan dengan desa lain, serta mengurangi tingkat kemiskinan [4].

2.1.1. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan itu sendiri merupakan titik ukur kepuasan dalam masyarakat yang didalamnya meliputi keadaan sehat, makmur, dan mampu. Dengan begitu, mengharuskan setiap individu untuk berusaha untuk memenuhi kepuasannya sesuai dengan kemampuannya [2].

Kesejahteraan masyarakat ini terjadi karena adanya dukungan dari pembangunan desa yang pendanaannya melalui dana desa. Dengan adanya pembangunan desa maka semakin banyak pula pembangunan prasarana desa yang akan berpengaruh secara langsung terhadap mobilitas masyarakat serta biaya yang diperlukan[5]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis. Analisis kualitatif merupakan analisis yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Fenomena dalam penelitian ini yaitu ketidakseimbangan antara dana desa dan pembangunan desa. Dimana data-datanya diperoleh dari berbagai sumber yang didapat oleh peneliti dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah yaitu mengumpulkan data, kemudian dipaparkan secara deskriptif dalam bentuk kalimat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pun menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder dapat diperoleh melalui pengamatan tidak langsung, dan menggunakan data dari penelitian terdahulu sehingga dapat lebih mempersingkat waktu dan tidak membutuhkan biaya atau modal yang banyak [6]

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Dana Desa sebagai pendongkrak kesejahteraan masyarakat

Prioritas utama penggunaan dana desa yaitu pembiayaan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu desa. Dimana dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri meliputi perbaikan kualitas masyarakat desa seperti ketertinggalan desa dan kemiskinan. Dimana kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang banyak terjadi di Indonesia. Faktor-faktor yang mengakibatkan masalah kemiskinan di Indonesia ini tidak segera terselesaikan adalah program-program penanggulangan kemiskinan hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial untuk keluarga miskin dan tidak tepat sasaran. Sehingga permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak kunjung teratasi. Dalam segi pembangunan pun, banyak desa yang belum tersentuh oleh pemerintah desa. Sehingga mengakibatkan tingkat urbanisasi meningkat dikarenakan banyak penduduk desa lebih memilih untuk bekerja di kota yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan di desa dan jumlah tenaga kerja desa tidak mampu meningkatkan output desa. Sehingga tingkat kemajuan desa lebih tertinggal daripada kota [7].

Dengan adanya dana desa, masyarakat dapat terbantu dan dapat dirasakan manfaatnya. Dimana dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa mampu mengurangi ketidakmerataan pembangunan. Pemanfaatan dana desa dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pemanfaatan secara fisik dan pemanfaatan secara non fisik. Pemanfaatan secara fisik berupa pembangunan desa yang meliputi pembangunan infrastruktur. Sedangkan pemanfaatan secara nonfisik berupa pemberdayaan masyarakat yang berupa bantuan untuk masyarakat kurang mampu, pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, dan segala bentuk kegiatan sosial lainnya. Pemanfaatan dana desa lebih tepatnya digunakan bersamaan untuk pembangunan sekaligus memberdayakan masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan dengan sendirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya [8]

Faktor Pembangunan Desa Tidak Mengalami Kemajuan

Pemerintah desa merupakan suatu lembaga yang tugasnya untuk mengatur dan mengolah suatu wilayah yaitu desa. Dalam menjalankan tugasnya yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Dimana keuangan desa sepenuhnya dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa yang merupakan pemegang kekuasaan dalam tingkat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa posisi kepala desa dan sekretaris desa harus di duduki masing-masing oleh satu orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya otonomi daerah. Dari susunan pemerintahan yang telah diuraikan sebelumnya, Desa Pertapan Maduretno memiliki seorang kepala desa dan seorang sekretaris desa. Dengan

begitu dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pertapan sudah sesuai dengan prosedur pemerintahan.

Desa Pertapan juga memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dimana masih banyak terdapat sawah yang hampir mengelilingi seluruh desa. Selain itu, banyak pula industri yang berdiri di desa ini. Jika dilihat dari potensi yang dimiliki memungkinkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi dan segala bentuk pendapatan dari perusahaan daerah mampu meningkatkan keuangan desa. Dalam hal infrastruktur desa Pertapan Maduretno cukup memadai, dan hanya beberapa permasalahan jalan di tepi sungai yang perlu penanganan. Selain itu terdapat pula pembangunan jalan sawah yang mangkrak dan tidak ada tindak lanjut kembali. Dalam hal pemberdayaan masyarakatnya pun belum dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Pertapan Maduretno. Pengelolaan BUMDes pun hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana desa Pertapan Maduretno tidak mengalami kemajuan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan pembangunan desa antara lain; sedikitnya jumlah SDM pemerintah desa yang memahami IT dalam hal pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut membuat adanya ketergantungan terhadap beberapa orang yang paham IT. Dua, kurang transparannya pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Sehingga diperlukan penambahan kapasitas yang lebih spesifik untuk kepala desa, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Tiga, kurangnya kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kemajuan desa. Karena dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka akan tercipta kemandirian masyarakat yang memiliki keterampilan. Dengan adanya keterampilan maka seseorang akan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri dan pada akhirnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mendongkrak Kesejahteraan Masyarakat

Dalam upaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat, diperlukan strategi pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan. Strategi tersebut antara lain: meningkatkan keterbukaan atau transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, dengan begitu kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, masyarakat juga akan terlibat secara langsung dalam segala kegiatan musyawarah yang membahas tentang rencana pengelolaan dana desa. Dengan begitu rencana pengelolaan dana desa dapat disetujui tidak hanya aparat desa, melainkan juga disetujui oleh masyarakat.

Strategi pengelolaan dana desa selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengolahan potensi desa. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat juga diperlukan adanya transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung serta mengawasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat juga akan percaya bahwa seluruh kegiatan telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa, maka rasa tanggung jawab dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa akan meningkat. Selain itu, jika potensi desa terus dimanfaatkan dan dikembangkan maka akan semakin tinggi pula tingkat perkembangannya [9]

Selain itu, strategi pengelolaan dana desa lainnya yaitu dengan menggunakan dana desa untuk kegiatan bimbingan teknis mengenai pengelolaan dana desa kepada perangkat desa. Dengan begitu SDM pemerintah desa mampu memahami IT dalam hal pengelolaan dana desa. Selain itu juga dapat dilakukan upaya pengoptimalisasian BUMDes yang telah dimiliki desa. Dengan begitu penggunaan dana desa dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan aturan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa tidak mengalami kemajuan antara lain : sedikitnya jumlah SDM pemerintah desa yang memahami IT dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dapat menciptakan adanya ketergantungan terhadap beberapa orang yang paham IT. Dua, kurang transparannya pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Tiga, kurangnya kegiatan dalam hal pemberdayaan masyarakat desa yang berpengaruh terhadap kemajuan desa. Adapun strategi pengelolaan dana desa sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan keterbukaan atau transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, memanfaatkan dana desa dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengolahan potensi desa, menggunakan dana desa untuk kegiatan bimbingan teknis mengenai pengelolaan dana desa kepada perangkat desa, serta pengoptimalisasian BUMDes yang telah dimiliki desa. Dengan begitu penggunaan dana desa dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan aturan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Rahayu, "Economics Development Analysis Journal Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang Depi Rahayu 1 □," *Econ. Dev. Anal. J.*, vol. 6, no. 2, pp. 107–116, 2017, [Online]. Available: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- [2] K. Siregar, "Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA DEDEKADU KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT," vol. 29, no. 96, p. 2017, 2013, [Online]. Available: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/967>.
- [3] D. Lalira, A. T. Nakoko, and I. P. F. Rorong, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud," *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 18, no. 4, pp. 62–72, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20951/20638>.
- [4] F. V. Tangkumahat, V. V. J. Panelewen, and A. D. P. Mirah, "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas," *Agri-Sosioekonomi*, vol. 13, no. 2A, p. 335, 2017, doi: 10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130.
- [5] M. Z. Abidin, "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa," *J. Ekon. Kebijak. Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 61–76, 2015, [Online]. Available: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/156>.
- [6] J. Mingkid, D. Liando, and J. Lengkon, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan," *Eksek. J. Jur. Ilmu Pemerintah.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/18676/18208>.
- [7] R. A. Mulia and N. Saputra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang," *J. EL-RİYASAH*, vol. 11, no. 1, p. 67, 2020, doi: 10.24014/jel.v11i1.10069.
- [8] M. Sultan, Sunardi, and I. Abu, "Jurnal Sosialisasi Jurnal Sosialisasi," *J. Sos.*, vol. 8, no. 1, pp. 39–46, 2021, [Online]. Available: http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php.
- [9] Y. D. Rahmawati, R. Dewi, and A. Mardiah, "Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan,” *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. September, pp. 189–202, 2021, doi: 10.24036/jmiap.v3i3.315.